



**Pendampingan Pelaksanaan Permohonan Mandiri Terkait Administrasi
Kependudukan Pada Aplikasi KNG (Klampid New Generation) Di Kelurahan
Simomulyo**

*Assistance In The Implementation Of Independent Applications Regarding Population
Administration In The KNG (Klampid New Generation) Application In Simomulyo Village*

Lukman Arif¹, Nabila Riyadiana²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: Lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id¹, 20041010009@student.upnjatim.ac.id²

Korespondensi Penulis: Lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 25 Mei 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 08 Juli 2023

Keywords: Independent
Application, Population
Administration, KNG
(Klampid New Generation)

Abstract: Population Administration (Adminduk) is an activity related to the arrangement and control of population registration and issuance of population documents through the Civil Registry Office. The role of the adminduk in state development is manifested in the planning of national development policies and programs as well as the realization of the civil rights of people who own population documents. With that, the Department of Population and Civil Registration has created an innovative administrative service, namely the KNG (Klampid New Generation) application. The introduction of this system will make it possible to help with online population administration. Management that has to come from below also makes people bored and finally chooses not to care about population administration as it should. Therefore, community assistance is carried out with independent applications regarding population documents through the KNG application and also provides an understanding regarding the requirements for independent applications for population documents that you wish to submit. The location of this research was conducted in Simomulyo Village, Sukomanunggal District, Surabaya City. Which aims to regulate the awareness of the residents of the Simomulyo Village to take care of or apply for population administration. It is hoped that with the assistance for submitting independent applications, it can make the community do it easily, effectively and quickly.

Abstrak

Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan pengendalian pendaftaran penduduk dan pengeluaran dokumen kependudukan melalui Kantor Catatan Sipil. Peran adminduk dalam pembangunan negara diwujudkan dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan nasional serta perwujudan hak-hak sipil masyarakat pemilik dokumen kependudukan. Dengan itu, Dinas Kependudukan dan

* Lukman Arif, Lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

Pencatatan Sipil membuat inovasi pelayanan adminduk yaitu aplikasi KNG (*Klamped New Generation*). Pengenalan sisten ini akan memungkinkan membantu pengurusan administrasi kependudukan secara online. Pengurusan yang harus datang dari bawah juga membuat masyarakat bosan dan akhirnya memilih untuk tidak peduli dengan administrasi kependudukan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dilakukannya pendampingan masyarakat dengan permohonan mandiri mengenai dokumen kependudukan melalui aplikasi KNG dan juga memberikan pemahaman terkait persyaratan permohonan mandiri untuk dokumen kependudukan yang ingin diajukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Surabaya. Yang bertujuan untuk menertibkan kesadaran warga Kelurahan Simomulyo untuk mengurus atau permohonan administrasi kependudukan. Diharapkannya dengan adanya pendampingan untuk pengajuan permohonan mandiri dapat membuat masyarakat melakukannya dengan mudah, efektif dan cepat.

Kata Kunci: Permohonan Mandiri, Administrasi Kependudukan, KNG (Klamped New Generation)

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah hak setiap warga negara dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya. Pemerintah pada dasarnya mulai mengembangkan pelayanan public berbasis teknologi digital ini sejak diperkenalkannya pemerintahan berbasis digital di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Pelayanan Publik 2009 No. 25 yang menjelaskan bahwa :

“Rangkaian aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggaraan pelayanan public merupakan penjelasan mengenai pelayanan public”. (Diana Putri & Roisul Basyar, 2023)

Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan pengendalian pendaftaran penduduk dan pengluaran dokumen kependudukan melalui Kantor Catatan Sipil. Data kependudukan dari pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, dan tepat waktu menjadi dasar perencanaan yang adil dan tepat sasaran. Pencatatan sipil meliputi peristiwa-peristiwa ada di kehidupan perorangan seperti Kelahiran, Kematian, lahir mati, Perkawinan, Perceraian, perubahan nama, perubahan biodata Kartu Keluarga. Peristiwa yang dialami penduduk juga dicatat dalam pendaftaran penduduk hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran penduduk seperti penerbitan KTP-el, KK dan surat keterangan kependudukan lainnya seperti pindah datang, pindah dalam kota, atau perubahan alamat.

Munculnya isu mengenai administrasi kependudukan tidak hanya diangkat oleh masyarakat local tetapi juga oleh pemerintah. Dari sudut pandang masyarakat, persepsi

kesadaran yang masih sangat rendah dalam mensukseskan tertib administrasi kependudukan, karena masyarakat menganggap bahwa data kependudukan tidak mempengaruhi kepentingan masyarakat dan pemerintah hanya membutuhkan data penduduk pada saat pemilu. Kebutuhan dan kegunaan data kependudukan dalam pemerintahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan public, belum banyak dipahami oleh masyarakat luas.

Dengan adanya permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi baru yaitu KNG (*Klampid New Generation*). Pengenalan sisten ini akan memungkinkan membantu pengurusan administrasi kependudukan secara online. Aplikasi KNG (*Klampid New Generation*) mencakup berbagai pengajuan permohonan adminduk seperti permohonan akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran, akta kematian serta proses pindah datang dan pindah keluar. KNG ini juga dilengkapi dengan karakter virtual bernama Cak Takon. Tujuan dari fitur Cak Takon adalah untuk memandu pengguna aplikasi KNG saat membutuhkan bantuan. Melalui Kecamatan dan Kelurahan, inovasi aplikasi KNG dapat diimplementasikan di masyarakat. Salah satunya terletak di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan kependudukan, salah satunya yang paling umum, adalah masih kurangnya SDM untuk pengelolaan kependudukan, terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan. Sumber daya manusia berada di garis depan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaporan peristiwa demografis utama seperti kelahiran dan kematian, pindah dan datang masih sangat sedikit.

Salah satu bentuk upaya penanganan masalah administrasi kependudukan diatas ialah dengan pendampingan masyarakat terkait permohonan administrasi kependudukan, dan sosialisasi terkait aplikasi KNG. Bukan hanya itu, tetapi memberikan pemahaman terkait pengajuan mandiri di akun KNG (*Klampid New Generation*). Masyarakat dapat melakukan permohonan secara mandiri, juga bisa diperbantu melalui pengajuan di Balai RW sekitar atau Kelurahan domisili. Dalam membangun upaya pendampingan pada masyarakat, para RT/RW, Kader KSH, Kelurahan dan mahasiswa magang MSIB 4 dapat berkolaborasi dalam mensosialisasikan mengenai permohonan mandiri administrasi kependudukan melalui KNG. Adanya pendampingan dari mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam memahami tertib administrasi kependudukan tanpa melalui Kelurahan maupun Kecamatan. Mengingat pentingnya peran RT/RW dan Kader KSH dalam pendampingan pelaksanaan permohonan mandiri terkait administrasi kependudukan pada aplikasi KNG (*Klampid New Generation*) melalui Kalimasada (*Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk*), sehingga

bersamaan dengan itu melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Permohonan mandiri tentang administrasi kependudukan dalam aplikasi KNG bagi masyarakat Kelurahan Simomulyo yang menjadi salah satu program dari luaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kegiatan pendampingan dilakukan melalui kegiatan Pendampingan Permohonan Administrasi Kependudukan yang mana mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer diperoleh langsung dari informan, dokumen dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen, media cetak, jurnal, media internet, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini

Pada tahap perencanaan untuk pendampingan permohonan mandiri pengajuan adminduk dilakukan survey atau observasi sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat dimulai. Setelah melakukan survey dilakukan tahap perencanaan yaitu perencanaan koordinasi dengan para RT/RW, Kader KSH, dan juga pihak Kelurahan. Tahap implementasi pendampingan permohonan mandiri terkait administrasi kependudukan melalui aplikasi atau website KNG.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat dilakukan melalui program KALIMASADA yang dibuat oleh Dispendukcapil melalui RT rintisan. Dari program KALIMASADA ini dilakukan juga untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk sadar dan tertib akan dokumen kependudukannya, dan masyarakat dapat di jelaskan untuk permohonan secara mandiri kepengurusannya melalui KNG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan yang mengeluarkan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan menggunakan hasilnya untuk pembangunan pelayanan publik dan bidang lainnya. Definisi di atas mengandung arti nyataanya setiap penduduk harus didata dan diatur melalui pengurusan dokumen yang

diterbitkan oleh Dispendukcapil, sehingga pemerintah dapat dengan mudah menanganinya apabila dokumen setiap penduduk dapat diurus dengan baik dan benar. Semua warga memiliki hak dan kewajiban. Sudah menjadi kewajiban seluruh warga untuk mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 yang melaksanakan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi publik pasal 1 ayat (1).

Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh pemerintah Kabupaten atau Kota (dalam hal ini unit pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);
2. Pelaksanaan pendaftaran penduduk oleh pemerintah provinsi.

Dari data kependudukan hingga pendaftaran kependudukan hingga pengelolaan informasi kependudukan, tanggung jawab pengelolaan kependudukan dianggap sangat penting bagi seluruh warga Negara, karena bertanggung jawab atas pembangunan Negara di masa depan. Data yang termasuk dalam administrasi kependudukan berkaitan dengan umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, persebaran penduduk dan aspek lain yang disebutkan dalam dokumen kependudukan.

Menurut (Cristianingsih, 2020) administrasi kependudukan memiliki system penyimpanan data kependudukan sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pelamar pada saat pengolahan data. Data ini menjadi data penting dokumen dan identitas penduduk yang digunakan sebagai persyaratan untuk hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari.

Menyelenggarakan dokumen administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil di seluruh Indonesia, melindungi dan memperlakukan secara adil, hak setiap penduduk dalam pengurusan segala urusan kependudukan yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, khususnya warga Negara Indonesia dan orang yang berada di Indonesia.

KNG (Klampid New Generation)

Melihat kondisi pelayanan publik dalam administrasi kependudukan saat ini, maka Pemerintah Kota Surabaya melalui afiliasinya yaitu Dispendukcapil Kota Surabaya perlu melakukan perubahan di bidang pelayanan public khususnya pelayanan kependudukan. Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya membuat inovasi dengan

meluncurkan aplikasi KNG (Klampid New Generation) untuk melakukan pengajuan pada permohonan administrasi kependudukan. Dengan adanya inovasi KNG ini, dapat memudahkan pemohon melakukan pengajuan. Selain itu terdapat juga tujuan untuk meningkatkan interaksi pemerintah dan warga untuk mengetahui kebutuhan warga dalam pelayanan administrasi kependudukan. Aplikasi KNG dapat memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan yang hanya dalam satu layanan aplikasi dengan dapat mengakses melalui website ataupun download di Playstore untuk pengguna Android.

Mewujudkan kepuasan masyarakat setempat melalui pelayanan prima melalui *Klampid New Generation* (KNG), layanan berbasis online yang dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya dengan menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan konsep e-government.

Aplikasi KNG adalah program e-Klampid yang awalnya tergabung dalam program e-Kios yang dibuka serentak di Balai Kota Surabaya pada tahun 2014 oleh Walikota Surabaya saat itu Tri Rismaharini. Pemerintah harus berupaya mengembangkan kebijakan dan peraturan, menjadi penyedia layanan public online dan memberdayakan masyarakat. E-Klampid sendiri merupakan salah satu program di dalam e-Kios. Kios Elektronik dinilai kurang mobile, sehingga pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya meluncurkan E-Klampid dalam bentuk website. Menurut (Tarantika & Megawati, 2022), perlunya evaluasi kebijakan di e-Kios adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan telah diterapkan dengan benar, memeriksa implementasi, dan menilai sejarah kebijakan tersebut.

Pada tahun 2015, e-Klampid awalnya hanya membuat empat layanan kependudukan: akta kelahiran, akta kematian, surat pindah datang, dan surat pindah keluar. Aplikasi tersebut telah beroperasi selama 5 Tahun dan pada tahun 2019 ditambahkan layanan pengurusan Akta Perkawinan dan Akta Percerian, sehingga nama program diubah menjadi aplikasi yang lebih efektif bernama (KNG) Klampid New Generation sebuah aplikasi e-klampid versi terbaru. Kehadiran inovasi aplikasi KNG (Klampid New Generation) diharapkan dapat mengaktifkan program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) dan memudahkan administrasi kependudukan, warga tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dispendukcapil secara langsung, karena bisa melakukan administrasi kependudukan dari rumah menggunakan handphone dan computer. Namun, jika masyarakat mengalami kesulitan mengurus administrasi kependudukan, mereka dapat menghubungi kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan sekitarnya untuk membantu dalam pengurusan lependudukan dan catatan sipil. Maka dari itu dengan adanya KNG sebagai penunjang pengurusan segala pelayanan

administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Masyarakat juga akan mengetahui tahap penyerahan berkas, Karena masyarakat dapat mengisi permohonan secara mandiri melalui akun KNG pribadi. Sebagaimana dalam pengajuan berkas tersebut dalam akun mandiri KNG melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pengajuan data melalui aplikasi KNG
2. Verifikasi dan validasi oleh petugas pusat
3. Berkas baru diterbitkan dan bisa diunduh/di download

Pendampingan Pelaksanaan Permohonan Mandiri Terkait Administrasi Kependudukan Pada Aplikasi KNG (Klampid New Generation) di Kelurahan Simomulyo oleh Mahasiswa MSIB 4 UPN Veteran Jawa Timur

Dalam rangka menyukseskan program Permohonan Mandiri melalui aplikasi KNG, Mahasiswa MSIB 4 melakukan pendampingan pelaksanaan permohonan mandiri terkait administrasi kependudukan melalui aplikasi KNG di Kelurahan Simomulyo. Pelayanan pendampingan adminduk yang biasa dilakukan oleh Kelurahan sendiri dilaksanakan selama seminggu 1 kali per RW. Pada minggu pertama, pendampingan permohonan mandiri adminduk dilakukan di RW 01, minggu kedua dilakukan di RW 02 dan selanjutnya. Pada saat melakukan pendampingan di setiap RW/RT, mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kelurahan Simomulyo mengenai masyarakat yang masih minim tertib administrasi kependudukan di setiap RW/RT melalui program KALIMASADA. Program KALIMASADA adalah program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk, inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Program KALIMASADA mempunyai tujuan yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya mempermudah proses pelayanan pada level RT sebagai penanggung jawab program KALIMASADA. Kalimasada mempunyai web yang bisa diakses oleh RT maupun Kelurahan melalui halaman <https://kalimasada.disdukcapilsurabaya.id/> dengan tampilan antara lain:

Gambar 3. 1 Tampilan Awal Web KALIMASADA

NO RW	BELUM REKAM			BELUM KIA			BELUM AKTA LAHIR			DIDUGA MENINGGAL		
	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%
1	106	1	0.94	815	4	0.49	41	0	0	60	32	53.3
2	42	0	0	226	2	0.88	8	0	0	17	10	58.8
3	23	14	60.87	119	70	58.82	1	1	100	9	8	88.8
4	43	0	0	201	0	0	8	0	0	25	11	44
5	56	5	8.93	186	23	12.37	8	0	0	2	2	100
6	110	6	5.45	609	3	0.49	38	0	0	55	35	63.6
7	244	45	18.44	1425	213	14.95	101	18	17.82	88	51	57.6

Pada Gambar 2.1, dimana tampilan awal web KALIMASADA, sebelum muncul laman halaman awal pengguna (RT/Kelurahan) masuk terlebih dahulu dengan username dan Password yang benar. Di tampilan awal terdapat beberapa menu pilihan seperti dashboard, update data, berita acara, dan data warga. Pada bagian kanan terdapat tabel ringkasan jumlah data yang belum rekam KTP, belum memiliki KIA, belum mempunyai Akta Kelahiran, Diduga meninggal, kawin belum tercatat, data tidak diketahui, dan data pindah luar kota setiap RW di Kelurahan Simomulyo.

Inovasi Dispendukcapil Surabaya melalui program KALIMASADA ini membuat mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kelurahan sangat mudah. Web KALIMASADA ini dapat mengetahui data warga yang belum tertib atau belum lengkap mempunyai dokumen kependudukan, dapat dilihat melalui menu update data, emmilih pilihan Kecamatan, Kelurahan, RW/RT. Setelah mengisi sesuai wilayah, maka keluar data warga yang masuk list untuk diutamakan pendampingan permohonan mandiri melalui aplikasi atau web KNG terkait dokumen kependudukan yang belum lengkap.

Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Adminduk melalui KNG di Kelurahan Simomulyo ini sudah sesuai dengan panduan pelaksanaan pendampingan permohonan mandiri terkait adminduk melalui aplikasi KNG di Kelurahan Simomulyo untuk RT,RW, dan Kader KSH oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.

Gambar 3. 2 Kordinasi dengan RW/RT



Gambar 2.3 merupakan kordinasi dengan RW/RT untuk memverifikasi data warga yang memang benar-benar belum mempunyai dokumen kependudukan. Pada kordinasi ini, mahasiswa MSIB4 memverifikasi data warga yang dokumen kependudukannya belum lengkap yang didapatkan melalui Website KALIMASADA dari hasil koordinasi dengan Kelurahan. Tujuan mahasiswa memverifikasi data melalui RT/RW atas data warga yang didapatkan dari Web KALIMASADA untuk diberikan arahan dan pendampingan terkait permohonan mandiri di aplikasi KNG (Klampid New Generation). Pada tahap ini komunikasi antara mahasiswa dengan RT dirasa cukup baik. Dalam proses memverifikasi data, banyaknya warga yang pindah, meninggal, tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut membuat hambatan dalam melakukan pendampingan permohonan mandiri online melalui KNG terkait dokumen kependudukannya. Dikarenakan jika ada warga dengan keadaan yang sudah disebutkan diatas pindah, tidak diketahui, meninggal, dimana hal tersebut didata ulang oleh pihak Kelurahan untuk dimasukkan ke data Cekin Warga.

Gambar 3. 3 Pendampingan Pelaksanaan Permohonan Mandiri Adminduk



Gambar 2.4 merupakan bentuk pendampingan pelaksanaan permohonan mandiri administrasi kependudukan kepada masyarakat. Mahasiswa MSIB 4 membantu membenarkan dokumen kependudukan masyarakat yang dirasa perlu perubahan dan mengurus dokumen

kependudukan lainnya yang belum lengkap seperti akta kelahiran, akta kematian, dll. Penjelasan mahasiswa dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya administrasi kependudukan supaya masyarakat tertib adminduk dan memahami atas program-program yang telah di buat oleh Dispendukcapil Surabaya yakni KNG (Klamped New Generation). Mahasiswa juga memberikan sosialisasi terkait persyaratan administrasi kependudukan yang dibutuhkan untuk upload di aplikasi KNG nya.

Gambar 3. 4 Pelaksanaan Permohonan Adminduk di Aplikasi KNG (Klamped New Generation)



Gambar 2.5 merupakan pendampingan mahasiswa dalam permohonan mandiri adminduk melalui KNG oleh warga Kelurahan Simomulyo. Permohonan mandiri adminduk oleh warga pada aplikasi KNG ini didampingi mahasiswa MSIB 4 untuk mengetahui persyaratannya apa saja yang hendak di upload di aplikasi KNG tersebut. Sehingga warga tidak merasa kesulitan atau takut untuk mengurus administrasi kependudukan dengan permohonan mandiri melalui aplikasi atau website KNG (Klamped New Generation). Pengisian pada aplikasi atau website KNG ini dengan hati-hati dan teliti, karena kesalahan dalam pengisian dokumen kependudukan dalam KNG akan berdampak besar pada file atau dokumen kependudukan yang lainnya pada saat sudah selesai dan terbitlah dokumen yang telah diajukan melalui aplikasi KNG. Penerbitan dokumen kependudukan melalui aplikasi KNG ini 1x24 jam, sehingga warga tidak perlu lagi khawatir ataupun mengantri pada saat permohonan.

Gambar 3. 5 Kader KSH RW 02 Kelurahan Simomulyo



Gambar 2.6 merupakan foto bersama dengan Kader KSH salah satu RW 002 yang ada di wilayah Kelurahan Simomulyo. Kader KSH berperan penting dalam pelaksanaan pendampingan permohonan mandiri adminduk di aplikasi atau website KNG oleh warga, sehingga perlu adanya pendampingan dari Kader KSH, karena Kader KSH sangat membantu mahasiswa dalam memberikan pendampingan kepada warga melalui JEMPUT BOLA atau door to door kerumah warga. Kader KSH juga diharuskan mengetahui permohonan mandiri adminduk melalui KNG, bila mana mahasiswa tidak berada di lingkungan untuk pendampingan permohonan warga, Kader KSH dapat mendampingi warga untuk melakukan permohonan adminduk nya. Sehingga pelaksanaan permohonan mandiri administrasi kependudukan melalui KNG dapat ditertibkan kepada warga Kelurahan Simomulyo supaya mendapat predikat lingkungan tertib administrasi kependudukan.

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Pelaksanaan pendampingan permohonan mandiri administrasi kependudukan oleh masyarakat melalui KNG merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan sadar atau tertib adminduk. Dengan melaksanakan pendampingan pada warga setiap minggunya, mahasiswa bekerjasama dengan RT, RW, dan Kader KSH di Kelurahan Simomulyo melakukan pendampingan setiap minggunya untuk menertibkan administrasi kependudukan yang belum lengkap. Pelaksanaan pendampingan permohonan adminduk oleh warga Kelurahan Simomulyo di dampingi oleh mahasiswa dan dijelaskan terkait persyaratan pengurusan adminduk secara mandiri melalui online dengan mengakses aplikasi atau website KNG (Klampid New Generation).

Mahasiswa MSIB 4 melakukan pendampingan pelaksanaan permohonan mandiri adminduk oleh warga melalui aplikasi KNG di Kelurahan Simomulyo. Kelurahan Simomulyo sendiri sebelumnya sudah menerapkan tertib administrasi kependudukan dengan bekerja sama

melalui RT/RW dan Kader KSH . Kelurahan Simomulyo sudah menerapkannya frngan baik. Pendampingan yang dilakukan mahasiswa salah satunya koordinasi melalui Kelurahan Simomulyo terkait data setiap RW yang masih banyak yang belum mempunyai dokumen penduduk lengkap. Setelah itu, mahasiswa melakukan koordinasi dengan RT/RW dan Kader KSH terkait warganya masing-masing wilayah. Kemudian, mahasiswa bersama Kader KSH melakukan Jemput Bola kerumah warga masing-masing untuk menjelaskan, dan memberikan pemahaman terkait pengajuan mandiri administrasi kependudukan melalui aplikasi KNG online. Dengan berjalannya pendampingan yang secara rutin, maka Kelurahan Simomulyo dapat menjadikan lingkungan sadar dan tertib administrasi kependudukan di Surabaya.

SARAN

Kegiatan pendampingan pelaksanaan permohonan mandiri administrasi kependudukan oleh masyarakat melalui KNG sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan yang ada. Namun, ada beberapa kendala yang mungkin masih banyak warga yang mengetahui teknologi digitalisasi. Maka dari itu, perlunya ditingkatkan lagi sosialisasi terhadap warga supaya mendapatkan cara yang efesien dan efektif, dan warga tidak merasa kesulitan pada saat permohonan mandiri secara online. Selain itu, dalam pelaksanaan pendampingan mungkin dibuat lebih cepat dan efektif, sehingga warga tidak perlu datang ke Kelurahan,Kecamatan maupun kantor Dispendukcapil Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 1–14. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>
- Diana Putri, A., & Roisul Basyar, M. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 694–701.
- Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 10(Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang), 1123–1136. [file:///C:/Users/GRAHA/Downloads/document \(2\).pdf](file:///C:/Users/GRAHA/Downloads/document%20(2).pdf)